

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI STRATEGI
PENANGGULANGAN TBC BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67
TAHUN 2021 DALAM RANGKA
MENCAPAI ELIMINASI TBC
TAHUN 2030 DI RSUD
BANDUNG KIWARI**



Diajukan oleh :
Titin Erisabeth
Nim: 22.c2.00084

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI STRATEGI
PENANGGULANGAN TBC BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67
TAHUN 2021 DALAM RANGKA
MENCAPAI ELIMINASI TBC
TAHUN 2030 DI RSUD
BANDUNG KIWARI**

TESIS

Diajukan memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :
Titin Erisabeth
Nim: 22.c2.00084

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penderita TBC yang terdeteksi di RSUD Kiwari menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan TBC dan memperbaiki celah-celah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 telah diimplementasikan untuk menurunkan angka insiden dan kematian akibat TBC.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Fokus penelitian mencakup pengaturan hukum strategi TBC, proses serta hasil implementasi di tahun 2024, dan kendala hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit telah melaksanakan strategi secara holistik dan partisipatif, dengan capaian positif seperti penurunan jumlah kasus dan meningkatnya keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan, terutama dalam penanganan TBC resisten obat, integrasi layanan TBC–HIV, dan pelaksanaan terapi pencegahan pada anak. Dari sisi regulatif, belum tersedianya peraturan teknis di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, menjadi kendala utama yang menghambat keberlanjutan program. Ketiadaan dasar hukum lokal berdampak pada ketidakpastian pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan minimnya pelibatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kesiapan hukum serta kelembagaan di tingkat daerah. Diperlukan penguatan regulasi lokal, sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi riset berbasis kebutuhan lokal agar strategi eliminasi TBC dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tuberkulosis, implementasi kebijakan, Perpres 67/2021.

ABSTRACT

The increase in detected tuberculosis (TB) cases at RSUD Kiwari indicates an urgent need to evaluate the implementation of TB control policies and address existing gaps. This study aims to assess the extent to which Presidential Regulation No. 67 of 2021 has been implemented to reduce the incidence and mortality of TB.

This research adopts a normative-empirical juridical approach by analyzing applicable regulations alongside field implementation through interviews and document studies. The study focuses on the legal framework of TB control strategies, the implementation process and outcomes in 2024, and the legal challenges encountered.

The findings reveal that the hospital has implemented the strategies in a holistic and participatory manner, achieving positive outcomes such as a reduction in TB cases and improved treatment success for drug-sensitive TB. However, the program still faces significant challenges, particularly in managing drug-resistant TB, integrating TB-HIV services, and delivering preventive therapy for children. From a regulatory perspective, the absence of technical rules at the local level—such as Regional or Mayoral Regulations—emerges as a key obstacle to program sustainability. The lack of a localized legal framework contributes to funding uncertainty, weak cross-sector coordination, and limited community engagement.

These findings highlight a gap between national policy and the legal-institutional readiness at the local level. Strengthening local regulations, enhancing inter-agency coordination, improving human resource capacity, and promoting evidence-based collaborative research are essential for ensuring that TB elimination strategies are implemented more effectively, accountably, and sustainably..

Keywords: Tuberculosis, policy implementation, Presidential Regulation 67/2021.